



**Dokumen Rancangan Akhir Renja
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pekalongan
Tahun 2023**



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 46 Kota Pekalongan Kode Pos 51114

Telepon: (0285) 423993 Faksimile 423993 e-mail dkpkotapekalongan@gmail.com

Website dkpkotapekalongan.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Tabel.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika	I-4
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-2
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-3
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERNGKAT DAERAH	 IV-1
BABV PENUTUP	V-1
5.1 Catatan Penting.....	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	V-1
5.3 Rencana Tindak lanjut.....	V-2
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 Kota Pekalongan	II-4
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2021 Target dan Proyeksi Tahun 2022 dan Tahun 2023	II-12
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Pekalongan	II-16
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Pekalongan	II-27
Tabel 3.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Nasional	III-1
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DKP Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	III-5
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DKP Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Rancangan akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan yang terbagi dalam tiga fase, yakni Renja Awal Perangkat Daerah, Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya Renja Awal Perangkat Daerah merupakan bahan awal untuk pembahasan dalam musrenbang tingkat Perangkat Daerah sebagai upaya perencanaan partisipatif dengan pendekatan *bottom up* dan *top down* proses dimana partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait sangat diperlukan guna menetapkan Rancangan akhir Renja menjadi Renja definitif Perangkat Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan Rancangan akhir Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2023 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023.

Dalam Rancangan akhir Renja DKP Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang terserap dari aspirasi masyarakat, baik dari Musrenbang kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota, forum perangkat daerah dan lain-lain yang selanjutnya disusun Rencana Kerja. Rancangan akhir Renja DKP Kota Pekalongan Tahun 2023 didalamnya memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja DKP Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
 21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
 22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
 23. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
 24. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Dokumen Rancangan akhir Renja DKP Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi DKP Kota Pekalongan dalam melaksanakan

rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Dokumen Rancangan akhir Renja DKP Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DKP Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 Sistematika

Rancangan akhir Rencana Kerja DKP Kota Pekalongan Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan akhir Renja DKP, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang.

Memuat tentang pengertian Renja DKP, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra).

1.2 Landasan Hukum.

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja DKP Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk DKP Kota Pekalongan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DKP berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan DKP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Selain itu, juga untuk dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan akhir awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan akhir awal RKPD, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan akhir awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya anggaran berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DKP.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DKP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DKP.

3.2 Program dan Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DKP Kota Pekalongan selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 DKP Kota Pekalongan sebesar Rp. 9.792.743,00 termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 1 (Satu) penunjang urusan pemerintahan, 4 program, 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 8.902.184.870,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 90,91%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 9.410.351.000,00 (belanja gaji dan tunjangan Rp. 4.126.326.00,00 melaksanakan 1 (Satu) penunjang urusan pemerintahan, 4 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program,kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DKP sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Kemampuan sumber daya manusia perencana dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kurang optimal;
3. Koordinasi antar stake holder perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang tidak maksimal menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;

4. Pemahaman tentang *output* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan dan sub kegiatan belum terdefinisi secara utuh, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *output* kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan/sub kegiatan.
5. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DKP dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Dari 4 (Empat) Program termasuk program rutin dengan 8 (Delapan) indikator kinerja outcome/hasil, terdapat 0 (Nol) indikator tercapai sesuai target, ada 2 indikator melebihi target, 1(satu) indikator yang targetnya disesuaikan menjadi 0 (nol) karena refocusing, serta ada 3 (Tiga) target indikator program yang dibawah target yang direncanakan. Sedangkan untuk kegiatan, terdapat 11 (Sebelas) kegiatan dengan 11 (Sebelas) indikator, terdapat 1 indikator dari 1 kegiatan yang targetnya disesuaikan menjadi 0, dan terdapat 29 (Dua Puluh Sembilan) subkegiatan 35 (tiga puluh lima) Indikator output / keluaran sesuai target yang sudah direncanakan. Adapun evaluasi kinerja hasil / keluaran program / kegiatan / subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Pada pelaksanaan renja tahun lalu (n-2) atau Tahun 2021, terdapat 3 (tiga) indikator program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI, peningkatan nilai produksi perikanan tangkap dan peningkatan nilai produksi perikanan budidaya. Sedangkan ada 1(satu) indikator kegiatan yang targetnya disesuaikan menjadi 0 karena anggaran direfocusing.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Indikator Program/kegiatan renja Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai yang direncanakan ada 5 (lima) indikator program antara lain , 8 (Delapan) indikator kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) indikator subkegiatan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Realisasi indikator program dan kegiatan tidak ada yang melebihi target kinerja yang direncanakan. Sedangkan realisasi indikator sub kegiatan yang melebihi terget kinerja ada 2 (Dua) kegiatan .
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Penyebab tidak tercapainya target indikator program dikarenakan proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi RKPD triwulan satu bersamaan dengan penyusunan RPJMD 2021-2026, sehingga proses penyusunan RKPD tidak tepat waktu sesuai dengan permendagri 86 tahun 2018.

Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan sesuai dengan perencanaan, yaitu adanya kesesuaian target kinerja dengan anggaran yang ditetapkan; kinerja masing-masing pelaksanaan kegiatan yang baik, dengan memperhatikan waktu dan anggaran yang sudah ada; koordinasi yang baik dengan instansi terkait, baik instansi vertikal, provinsi maupun OPD di Kota pekalongan.

Adapun faktor-faktor melebihi target kinerja pada kegiatan, disebabkan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan jumlah anggaran yang direncanakan dapat meningkatkan kinerja yang ditentukan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Meskipun target Kinerja program capainya dibawah target, namun secara keseluruhan tidak berpengaruh pada capaian program renstra secara signifikan dan tidak ada Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DKP Kota Pekalongan yang sudah dilakukan maring berdasarkan permendagri 90 tahun 2019, didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA URUSAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

KODE SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEG / SUB KEGIATAN\	SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	Target Akhir Renstra	Satuan	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016 -2021)	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2021	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
							Target 2021	Realisasi Th.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25.0.00.0.00.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan										
1.00	URUSAN UMUM										
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100	persen		-	100	100	100	100	Tercapai
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	6	dokumen	1	-	1	1	5	100	Tercapai
		Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	12	dokumen	2	-	2	2	1	100	Tercapai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun	24	dokumen	4	-	4	4	20	100	Tercapai
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	24	dokumen	4	-	4	4	20	100	Tercapai
		Jumlah dokumen saku yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	12	dokumen	2	-	2	2	10	100	Tercapai
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	30	dokumen	5	-	5	5	25	1000	Tercapai
		Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	72	bulan	12	12	12	12	60	100	Tercapai
202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen			100	100	100	100	Tercapai
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	48	12	12	12	60	100	Tercapai
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	72	bulan	48	12	12	12	60	100	Tercapai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	6	dokumen	48	-	1	1	5	100	Tercapai
205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	persen			0	0	0	0	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik	0	kali	0		0	0			
206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	persen			100	100	100	100	Tercapai
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	bulan	48	12	12	12	60	100	Tercapai
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	72	bulan	48	12	12	12	60	100	Tercapai
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	66	unit	264	66	66	66	330	100	Tercapai
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	72	bulan	48	12	12	12	60	100	Tercapai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	44	11	11	11	55	100	Tercapai
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72	bulan	48	12	12	12	60	100	Tercapai
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	72	bulan	48	12	12	12	60	100	Tercapai
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	100	orang/kali	400	100	100	100	500	100	Tercapai
208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen			100	100	100	100	Tercapai
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	72	bulan	48	12	12	12	60	100	Tercapai
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	bulan	48	12	12	12	60	100	Tercapai
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	72	bulan	48	12	12	12	60	100	Tercapai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen			100	100	100	100	Tercapai
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	156	unit	26	34	26	26	130	100	Tercapai
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala dan beroperasi	6	buah	1	1	1	1	5	100	tercapai
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	18	unit	3	1	3	3	15	100	Tercapai
		Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	0	unit	0		0	0			
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	72	bulan	12	12	12	12	60	100	Tercapai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	2	Milyar			2 M	-18		-9%	Tidak Tercapai
		Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	2	persen			2%	-18		-9%	Tidak Tercapai
		Nelayan yang dibina	8	persen			8%	15,16%		190%	Tercapai
201	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	2	Rp. Milyar							
01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah laporan statistik	6	buku	1		1	1	5	100	Tercapai
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	6	kali	0		1	1	5	100	Tercapai
02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap										
		Jumlah pembangunan perluasan cold storage	6	lokasi	0		-	1	1	5	100
		Jumlah cold storage yang diadakan	6	unit	1		1	1	5	100	Tercapai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
202	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	2	persen								
01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan	198	KUB	30		33	33	165	100	Tercapai	
203	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	2	persen								
01	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI	72	bulan	48	12	12	12	60	100	Tercapai	
		Jumlah Bulan Upah karyawan/karyawati TPI	72	bulan	48	12	12	12	60	100	Tercapai	
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya	5	persen			-24,36	-24,36		-487,13	Tidak Tercapai	
202	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil											
01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah benih ikan yang diadakan	18.990	ekor		-	3.165	3.165	0	3.165	Tercapai
			Jumlah dokumen kajian tambak yang disusun									
02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklasar yang dilaksanakan	-	kategori			-	0	0	0	0	
204	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	5	persen								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB) / Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB) yang diselenggarakan	3	kali			3	0	0	0	Refocusing	
05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pakan ikan induk yang diadakan	2.400	kg			0	900	0	1500	Tercapai	
		Jumlah rehab kolam ikan BBI	3	kolam			0	0	0	3	Tercapai	
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	45	persen			45	51,69		51,69	Tercapai	
203	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	45	persen			45%	45%	45%	100	Tercapai	
02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah terpeliharanya kawasan technopark	6	kawasan	1		1	1	5	100	Tercapai	
		Jumlah taman yang dibangun	1	unit	1		-	1	1	2	100	Tercapai
		Jumlah saluran yang dibangun	66,8	meter			-	66,8	66,8	66,8	100	Tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan Penyajian rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dilakukan dengan melihat Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Berdasarkan Peraturan Walikota 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan dipimpin oleh Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya serta 2 (Dua) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.

2.1.1 Tugas

- 1) DKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) DKP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas DKP menyelenggarakan fungsi :

- I. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan sasaran program bidang kelautan dan perikanan
 - b. Perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perikanan tangkap;
 - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perikanan budidaya;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;
 - g. Pengarahan dan pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
 - h. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perumusan kebijakan, pelaksanaan rencana kerja dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum serta administrasi di bidang kelautan dan perikanan;
- II. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;

- d. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
 - e. Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - f. Pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
 - g. Pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang kepegawaian;
 - h. Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
 - i. Pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - j. Pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
 - k. Pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
 - l. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- III. Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan program kerja bidang perikanan tangkap;
 - b. Perumusan bahan kebijakan bidang perikanan tangkap;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan;
 - e. Penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil;
 - f. Penyelenggaraan penerbitan tanda daftar kapal penangkapan ikan ≤ 10 GT;
 - g. Penyelenggaraan penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan ≤ 10 GT;
 - h. Penyelenggaraan layanan pendaftaran kapal penangkapan ikan ≤ 10 GT;
 - i. Penyelenggaraan pengawasan sumber daya perikanan;
 - j. Pengkoordinasian pengelolaan wilayah pesisir dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - k. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang perikanan tangkap;
 - l. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- IV. Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan program kerja bidang perikanan budidaya;
 - b. Perumusan bahan kebijakan bidang perikanan budidaya;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya;
 - d. Penyelenggaraan rekomendasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan;
 - e. Penyelenggaraan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
 - f. Penyelenggaraan penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - g. Pengkoordinasian pengelolaan budidaya perikanan;
 - h. Penyelenggaraan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan budidaya;

- i. Penyelenggaraan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan ikan budidaya;
- j. Pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
- k. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang perikanan budidaya;
- l. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah PNS SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Golongan I	0	0	0	0
2	Golongan II	8	8	27,59	30,77
3	Golongan III	13	10	44,82	38,46
4	Golongan IV	8	8	27,59	30,77
	Jumlah	29	26	100,00	100,00

Tabel 2.3 Rekapitulasi Jumlah PNS SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
1	SD	0	0	0,00	0,00
2	SLTP	3	2	10,34	7,69
3	SLTA	7	8	24,14	30,77
4	DIPLOMA I	0	0	0,00	0,00
5	DIPLOMA II	0	0	0,00	0,00
6	DIPLOMA III	3	1	10,34	3,85
7	DIPLOMA IV	0	0	0,00	0,00
8	S-1	13	13	44,84	50,00
9	S-2	3	2	10,34	7,69
10	S-3	0	0	0,00	0,00
	Jumlah	29	26	100,00	100,00

Tabel 2.4 Rekapitulasi Pejabat Struktural SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Tingkat Eselon	Jumlah		Prosentase (%)	
		2020	2021	2020	2021
1	II.A	0	0	0	0
2	II.B	1	1	6,67	7,14
3	III.A	1	0	6,67	0
4	III.B	2	3	13,33	21,43
5	IV.A	10	10	66,66	71,43
6	IV.B	1	0	6,67	0
	Jumlah	15	14	100,00	100,00

Kondisi Sarana dan Prasarana Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan memiliki sarana prasarana Tahun 2022 adalah:

A. Sarana tidak bergerak berupa

Tabel 2.5 Rekapitulasi Sarana tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
1	Tanah	4
2	Gedung dan bangunan	45
3	Jalan Irigasi dan jaringan	43

B. Sarana bergerak berupa :

Tabel 2.6 Rekapitulasi Sarana Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

No	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
	Peralatan dan mesin	
1	Alat besar	4
2	Alat angkutan	144
3	Alat bengkel dan dan alat ukur	56
4	Alat pertanian	43
5	Alat kantor dan rumah tangga	795
6	Alat Studio, komunikasi dan pemancaran	69
7	Alat kedokteran dan kesehatan	3
8	Alat laboratorium	116
	Aset Tetap Lainnya	
1	Bahan perpustakaan	107
2	Barang bercorak kesenian /kebudayaan/olahraga	19
	Aset Lainnya	
1	Aset kondisi rusak berat	1
2	Aset Non Aktif	1

4. Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat, tetapi hanya sebagian saja usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Kecilnya realisasi dari usulan tersebut disebabkan keterbatasan anggaran sehingga berdasarkan penentuan skala prioritas dan kebijakan yang ada.

Pada Tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan melaksanakan 1 (Satu) urusan pilihan Kelautan dan Perikanan : 4 program, 10 kegiatan dan 29 dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

- a) Nilai AKIP
Penilaian didasarkan atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang meliputi laporan kinerja instansi pemerintah, rencana aksi, perjanjian kinerja dan capaian kinerja OPD pada tingkat kota, provinsi maupun nasional. Berdasarkan penilaian AKIP yang dilaksanakan oleh inspektorat, DKP mendapat nilai 80,42 dari target 82,5 atau ketercapaiannya 97,5%
- b) Persentase capaian target pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar Rp 5,5 Milyar
Tingkat capaian kinerja pada indikator ini sebesar 4,35 dari target 5,5% tercapai 79,1%. Capaian tersebut dapat dilihat dari program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD.
- c) Nilai produksi perikanan tangkap, dengan ketercapaian 79,1% yaitu dari target 183,33 M tercapai 145,06 M.
- d) Nilai produksi perikanan budidaya ,realisasi indikator ini 29,23% dari target 24,36% dengan capaian 119,99 M.
- e) Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
Hasil penilaian oleh Dinas Komunikasi dan informasi, diperoleh nilai 939 dengan target 850, atau ketercapaiannya 110%.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel T-C.30 dibawah ini :

Tabel T- C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP Kota Pekalongan

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DKP	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke		Catatan Analisis		Proyeksi
			n-2	n-1	n	(n+1)	n-2	n-1	(n)	(n+1)	(n)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah											
Nilai SAKIP OPD	-	-	81,5	83	84,5	86	80,42		84,5	86	Indeks
Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)											
Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	-	-	14.991	15.141	15.293	15.446	10.536		15293	15446	Ton

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan - permasalahan umum yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan secara singkat diuraikan sebagai berikut:

1. *Kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah ;*
 - Masih perlunya penumbuhan dan peningkatan kesadaran (dari aparaturnya maupun nelayan) akan konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
 - Masih perlunya usaha pengolahan hasil perikanan di Kota Pekalongan mayoritas masih dalam taraf tradisional, sehingga diperlukan pendampingan dalam hal penumbuhan usaha dengan menggunakan teknologi tepat guna, baik dalam hal pengolahan, pengemasan dan pemasaran.
 - Masih perlunya pendampingan pelatihan, praktek lapangan, pendampingan pemasaran.
 - Masih perlunya peningkatan pemasaran melalui keikutsertaan dalam bazar, pemasaran online, melalui *marketplace* dan *website*..
2. *Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.*
 - Masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan di TPI Pekalongan;
 - Masih rendahnya produksi dan produktivitas lahan perikanan budidaya;
 - Daya serap ikan hasil pelelangan masih terbatas yaitu sekitar 40 ton perhari disebabkan karena bakol-bakol tidak mampu mencari pangsa pasar;
 - Terbatasnya kapal-kapal pengangkut produksi ikan di laut yang memiliki pangkalan di pelabuhan Pekalongan;
 - Adanya musim Barat dan Timur yang menyebabkan nelayan tidak bisa berangkat melaut untuk mencari ikan;
 - berkurangnya lahan karena terinterusi air laut;
 - Minimnya pasokan air tawar di kawasan budidaya ikan;
 - Sungai yang tercemar air limbah sehingga sumber air susah untuk sarana budidaya ;
 - Banyak pembudidaya yang beralih profesi.
3. *Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);*
 - Terbinanya pengusaha pemula yang bergerak di bidang hasil olahan perikanan dan penumbuhan pengusaha baru di bidang usaha olahan perikanan ;
 - Terkelolanya dan termanfaatkannya sumberdaya perikanan secara berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi secara optimal.
4. *Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah*

Tantangan dalam pelayanan yang akan datang antara lain sebagai berikut:

 - a) **Perikanan Budidaya**
 - Rusaknya prasarana dan infrastruktur kawasan budidaya karena interusi air laut, banjir rob, cuaca yang tidak menentu dll menyebabkan menurunnya fungsi lahan budidaya;
 - Minimnya pasokan air yang sesuai standar budidaya dampak dari pencemaran sungai menyebabkan terganggunya lingkungan dan kesehatan ikan;
 - Masih tingginya harga pakan ikan;
 - Kemampuan dan keterbatasan SDM pelaku usaha perikanan budidaya masih rendah.

- Perlunya *update* keterampilan tentang peluang usaha olahan perikanan yang kekinian dan *marketable*, sehingga pengelola harus selalu meng-*update* pengetahuan atau keterampilan di bidang olahan.
- Perlunya kerja sama dengan pihak-pihak yang menguasai teknologi olahan hasil perikanan dan pemasaran.
- Perlunya penguasaan IT secara terus menerus.

b) Perikanan Tangkap

- Bantuan program asuransi nelayan hanya diberikan kepada nelayan berukuran dibawah 10 GT sedangkan untuk kapal diatas 10 GT belum adanya program asuransi nelayan.
- Daya serap ikan hasil pelelangan masih terbatas yaitu sekitar 40 ton perhari disebabkan karena bakul – bakul ikan di TPI terbatas;
- Terbatasnya kapal-kapal pengangkut produksi ikan di laut yang memiliki pangkalan di pelabuhan Pekalongan.
- Adanya musim Baratan dan Timuran yang menyebabkan nelayan tidak bisa berangkat melaut untuk mencari ikan.
- Perlunya pelibatan masyarakat (nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan) secara masif.

Peluang pengembangan pelayanan yang akan datang antara lain sebagai berikut:

a) Perikanan Budidaya

- Lahan – lahan sawah yang terinterusi air laut dan saat ini tergenang merupakan potensi untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya ikan dengan teknologi budidaya ikan yang adaptif;
- Potensi untuk mengembangkan budidaya ikan hias karena keterbatasan lahan perkotaan;
- Kawasan budidaya ikan / udang di Kelurahan Degayu dan Slamaran yang sudah difasilitasi jaringan listrik 3 (tiga) phase belum dimanfaatkan secara optimal;
- Kawasan technopark perikanan belum dimanfaatkan secara optimal;
- Tersedianya asuransi budidaya (bantuan dan mandiri).

b) Perikanan Tangkap

- Adanya Perda Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan sebagai dasar pembinaan nelayan.
- Terdapatnya sarpras perikanan tangkap meliputi coldstorage, galangan dan dogging kapal, pabrik es, serta SPBU/ SPBN Nelayan.
- Adanya Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara.
- Keterbukaan untuk melakukan usaha sampingan nelayan dan keluarganya.
- Adanya pelelangan ikan yang berasal dari mobil berpendingin.

5. **Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.**

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa **isu strategis** yang menjadi landasan bagi penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 yakni:

a. Perikanan Budidaya

- 1) Banjir hujan di awal tahun dan banjir rob pertengahan tahun;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan mangrove untuk budidaya perikanan;

- 3) Masih perlu peningkatan usaha budidaya ikan hias (cupang dan Guppy);
- 4) Masih banyaknya budidaya perikanan air payau (tambak) secara tradisional;
- 5) Perubahan ekosistem (dari air payau menjadi air tawar);
- 6) Masih Banyaknya kelompok pembudidaya yang belum memiliki Badan Hukum;
- 7) Masih banyaknya Pembudidaya yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Ijin Usaha Budidaya;
- 8) Masih banyaknya Unit Pengolahan Ikan yang belum menerapkan SKP; (sertifikat kelayakan pengolahan) dan GMP (Good Manufacturing Practice);
- 9) Berkurangnya Lahan Produksi Budidaya;
- 10) Keterbatasan sumber air untuk usaha budidaya;
- 11) Masih banyaknya pembudidaya yang belum menerapkan dan memiliki sertifikat CBIB / CPIB
- 12) Belum adanya Perda Perlindungan Budidaya

b. Perikanan Tangkap

- 1) Pembangunan bendung gerak yang berdampak pada :
 - Pentingnya docking kapal sehingga mengurangi minat kapal untuk lelang di TPI;
 - Pembuatan parapet tinggi hamper 2 m dapat menyebabkan penambahan biaya dan waktu bongkar.
- 2) Banjir rob di TPI semakin tinggi terutama di parkir yang berdampak pada turunnya minat penjualan ikan dari truk freezer yang lelang di TPI;
- 3) Kemampuan bakul masih kecil sekitar 40 ton perhari sehingga apabila jumlah yang dilelang melebihi 40 ton harga ikan cenderung turun.
- 4) Belum disahkannya Dasar Hukum Pelaksanaan Lelang Terbatas dan Lelang sampel;
- 5) Tinggi sedimentasi alur muara pelabuhan Kota Pekalongan yang menyebabkan pendangkalan sehingga mempengaruhi kapal keluar masuk pelabuhan;
- 6) Masih Perlunya Penertiban Kapal – kapal pendatang (Penampung, Non Pangkalan, Penangkap);
- 7) Masih Rendahnya Produktivitas Nelayan Kecil karena keterbatasan Sarpras dan ketrampilan dalam menangkap ikan;
- 8) Kurangnya perlindungan Keselamatan Nelayan Kecil (5GT);
- 9) Perlunya Peningkatan Kelembagaan KUB (Kelompok Usaha Bersama) dan Tumbuhnya KUB Baru;
- 10) Perlunya Kelengkapan Dokumen Kapal, Nelayan dan NIB (Nomor Ijin Berusaha);
- 11) Masih rendahnya cara penanganan ikan yang baik di atas kapal dan di TPI.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

**Tabel T-C.31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN
2023 KOTA PEKALONGAN**

OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	22.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	16.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen	2.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen	2.500.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DKP Kota Pekalongan	jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DKP Kota Pekalongan	jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	- jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah - jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun - jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) - jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	- 12 bulan - 4 dokumen - 2 dokumen - 5 dokumen	18.250.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	- jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah - jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun - jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) - jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	- 12 bulan - 4 dokumen - 2 dokumen - 5 dokumen	12.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.387.860.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	3.526.830.000	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.331.340.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.470.310.000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	55.020.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	55.020.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP Kota Pekalongan	- jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP Kota Pekalongan	- jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	9.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	9.500.000	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DKP Kota Pekalongan	jumlah keikutsertaan dalam Karnaval Batik dan hari jadi	2 kali	9.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DKP Kota Pekalongan	jumlah keikutsertaan dalam Karnaval Batik dan hari jadi	2 kali	9.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	312.290.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	261.249.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.	12 bulan 5 unit	78.230.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.	12 bulan 5 unit	78.230.000	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	4.977.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	4.500.000	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	60.763.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	60.763.000	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	8.056.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.456.000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.574.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKP Kota Pekalongan	jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	100 orang/kali	149.890.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKP Kota Pekalongan	jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	100 orang/kali	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	474.955.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP Kota Pekalongan	ersentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.860.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.700.000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	162.377.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	140.425.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan / bahan kebersihan kantor	12 bulan	310.718.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan / bahan kebersihan kantor	12 bulan	310.650.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP Kota Pekalongan	persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	449.688.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP Kota Pekalongan	persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	456.883.000	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKP Kota Pekalongan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	25 unit	101.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKP Kota Pekalongan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	25 unit	112.595.000	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKP Kota Pekalongan	- jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit	17.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKP Kota Pekalongan	- jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit	17.400.000	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKP Kota Pekalongan	jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	1 unit	298.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKP Kota Pekalongan	jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	1 unit	296.700.000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan terpeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	31.688.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan terpeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	30.188.000	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DKP Kota Pekalongan	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 persen	298.048.500	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DKP Kota Pekalongan	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 persen	298.048.000	
22	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	DKP Kota Pekalongan	umlah dokumen statistik perikanan tangkap yang disusun	1 dokumen	76.334.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	DKP Kota Pekalongan	umlah dokumen statistik perikanan tangkap yang disusun	1 dokumen	76.334.000	
23	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	DKP Kota Pekalongan	Jumlah prasarana usaha perikanan yang diadakan	1 unit	107.428.500	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	DKP Kota Pekalongan	Jumlah prasarana usaha perikanan yang diadakan	1 unit	107.428.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah penjaminan sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia - Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia	1 unit	114.286.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah penjaminan sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia - Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia	1 unit	114.286.000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	DKP Kota Pekalongan	Persentase Nelayan kecil yang dibina	10 persen	188.754.800	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	DKP Kota Pekalongan	Persentase Nelayan kecil yang dibina	10 persen	115.385.000	
25	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DKP Kota Pekalongan	- jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitas - Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan yang dibina	33 KUB	73.530.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DKP Kota Pekalongan	- jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitas - Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan yang dibina	33 KUB	71.418.000	
26	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya - Jumlah kelompok nelayan yang dibina	4 kelompok	71.258.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya - Jumlah kelompok nelayan yang dibina	4 kelompok	-	
27	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah pendampingan nelayan yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha yang dilaksanakan - Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Nelayan	43.966.800	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah pendampingan nelayan yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha yang dilaksanakan - Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Nelayan	43.967.000	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	DKP Kota Pekalongan	peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	1 persen	2.552.187.450	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	DKP Kota Pekalongan	peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	1 persen	2.552.187.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	DKP Kota Pekalongan	- jumlah bulan sewa gedung dan peralatan TPI - Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 bulan	2.552.187.450	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	DKP Kota Pekalongan	- jumlah bulan sewa gedung dan peralatan TPI - Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 bulan	2.552.187.000	
	penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP Kota Pekalongan	Persentase jumlah permohonan kapal yang didaftarkan	43.33 persen							
29	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah dokumen pencatatan kapal - Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 dokumen	40.904.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah dokumen pencatatan kapal - Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 dokumen	40.904.000	
30	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah pendataan kapal - Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	10 kapal	11.000.000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah pendataan kapal - Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	10 kapal	11.000.000	
31	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah Pelayanan Pendaftaran yang dilayani - Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan	70 kapal 1 persen	21.816.720	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah Pelayanan Pendaftaran yang dilayani - Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan	70 kapal 1 persen	21.247.000	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	DKP Kota Pekalongan	persentase Pembudidaya yang dibina	10 persen	63.633.680	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	DKP Kota Pekalongan	persentase Pembudidaya yang dibina	10 persen	63.600.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	DKP Kota Pekalongan	Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklhas yang dilaksanakan	4 kategori	43.000.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	DKP Kota Pekalongan	Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklhas yang dilaksanakan	4 kategori	43.000.000	
33	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	DKP Kota Pekalongan	Jumlah pelatihan kolam bundar yang diadakan	1 kali	20.633.680	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	DKP Kota Pekalongan	Jumlah pelatihan kolam bundar yang diadakan	1 kali	20.600.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100 persen	231.765.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100 persen	351.000.000	
34	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen data bidang budidaya yang disusun	1 dokumen	15.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen data bidang budidaya yang disusun	1 dokumen	12.000.000	
35	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah Prasarana Tambak Dinas/BBI yang dibangun - Jumlah UPI yang direhab	1 unit 1 unit	75.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah Prasarana Tambak Dinas/BBI yang dibangun - Jumlah UPI yang direhab	1 unit 1 unit	180.000.000	
36	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota - Jumlah Sarana Usaha Pembudidayaan yang diadakan Terkelolanya Balai Benih Ikan (BBI)	1 unit 1 BBI	104.505.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota - Jumlah Sarana Usaha Pembudidayaan yang diadakan Terkelolanya Balai Benih Ikan (BBI)	1 unit 1 BBI	124.000.000	
37	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	DKP Kota Pekalongan	- jumlah benih ikan yang diadakan - jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di darat	750 ekor	37.260.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	DKP Kota Pekalongan	- jumlah benih ikan yang diadakan - jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di darat	750 ekor	35.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DKP Kota Pekalongan	persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70 persen	1.055.990.000	penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DKP Kota Pekalongan	persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70 persen	935.990.000	
38	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	DKP Kota Pekalongan	- jumlah gedung technopark yang terpelihara secara rutin - jumlah pelaksanaan gemar makan ikan - jumlah rehab gedung dikawasan technopark	1 Kawasan 1 kali 0 Pelaku Usaha 2 unit	1.055.990.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	DKP Kota Pekalongan	- jumlah gedung technopark yang terpelihara secara rutin - jumlah pelaksanaan gemar makan ikan - jumlah rehab gedung dikawasan technopark	1 Kawasan 1 kali 0 Pelaku Usaha 2 unit	935.990.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, terlebih dahulu telah dilakukan penjangkauan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Walikota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Tidak ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan DKP Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

Tabel T-C.32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
 Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun
 Anggaran 2023 DKP Kota Pekalongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">NIHIL</p> </div>					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana kerja (renja) perangkat daerah disusun sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sedangkan RKPD disusun dengan menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renja DKP Tahun 2023 sesuai dengan RKPD 2023, yang merupakan penjabaran atas RPJMD 2021-2026.

Selain berpedoman pada RPJMD 2021-2026, RKPD tahun 2023 termasuk juga Renja Tahun 2023 berpedoman pada RKP Tahun 2023, dengan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun penyelarasan prioritas pembangunan Kota pekalongan dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan
Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
N	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
		2	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi		-
3	Meningkatkan Sumber Berkualitas dan Berdaya Saing	3	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan germas), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
		4	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana dan prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
		5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan

No	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
4			pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)
5	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6	Peningkatan peran serta dan kerjasama komunitas dan penyelenggaraan event seni dan budaya
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	7	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
		8	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata , ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa yang mampu bersaing
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	9	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		10	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11	Optimalisasi peran serta stake holder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : RKPDP Kota Pekalongan Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinarasikan bahwa prioritas yang dapat diambil dari rencana kerja DKP adalah pada prioritas RKPDP, Peningkatan kualitas SDM Pariwisata , ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa yang mampu bersaing .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja DKP tahun 2023 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua kepemimpinan walikota dan wakil walikota periode 2021-2026 yang arah kebijakannya sesuai dengan RPJMD 2021-2026. Selain itu Rencana Strategis DKP yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja juga sudah disusun untuk jangka waktu 2021-2026.

Sehubungan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja DKP mengacu pada RPJMD 2021- 2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023 dan didasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Lima Tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Arah kebijakan makro selanjutnya dirumuskan menjadi sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai ini, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran perangkat daerah, sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar waktu dan antar lembaga. Dalam kaitannya dengan penetapan prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema pembangunan Tahun 2023, maka kedudukan DKP adalah mendukung secara langsung dalam prioritas daerah yang pertama, yaitu Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel serta terjaganya kondusivitas wilayah.

Rencana Kerja DKP Kota Pekalongan Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi semua bidang dan sekretariat di DKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, rencana ini dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri dalam meningkatkan kinerja DKP.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja DKP Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023, serta isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKP Kota Pekalongan.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang spesifik,terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan yang ditetapkan adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Publik, Meningkatkan produksi perikanan dan Sasaran yakni meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, meningkatnya nilai produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya). sehingga DKP sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif yang efektif dan efisien.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh DKP dengan dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di DKP antara lain terhadap:

1. Peningkatan kualitas SDM Pariwisata , ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa yang mampu bersaing ;
2. Sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kaitannya dengan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, pada tahun 2023 DKP Kota Pekalongan merencanakan akan mencapainya dengan melaksanakan 4 Program yang terdiri 13 kegiatan dengan 38 sub kegiatan dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Pekalongan.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Renja) DKP Kota Pekalongan Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023, tercantum dalam tabel T-C.3.3. sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	DKP Kota Pekalongan	100 persen	16.000.000	DAU		100 persen	22.500.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja yang disusun	DKP Kota Pekalongan	2 dokumen	2.500.000	DAU		2 dokumen	2.750.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	DKP Kota Pekalongan	2 dokumen	1.500.000	DAU		2 dokumen	1.500.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah - jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun - jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) - jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	DKP Kota Pekalongan	- 12 bulan - 4 dokumen - 2 dokumen - 5 dokumen	12.000.000	DAU		- 12 bulan - 4 dokumen - 2 dokumen - 5 dokumen	18.250.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	DKP Kota Pekalongan	100 persen	3.526.830.000	DAU		100 persen	4.072.454.000
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DKP Kota Pekalongan	12 bulan	3.470.310.000	DAU		12 bulan	4.001.454.000
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	DKP Kota Pekalongan	12 bulan	55.020.000	DAU		12 bulan	60.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	DKP Kota Pekalongan	1 dokumen	1.500.000	DAU		1 dokumen	1.500.000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	100 persen	9.500.000	DAU		100 persen	9.500.000
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah keikutsertaan dalam Karnaval Batik dan hari jadi	DKP Kota Pekalongan	2 kali	9.500.000	DAU		2 kali	9.500.000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	DKP Kota Pekalongan	100 persen	261.249.000	DAU		100 persen	239.250.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DKP Kota Pekalongan	12 bulan	7.800.000	DAU		12 bulan	7.500.000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.	DKP Kota Pekalongan	12 bulan 5 unit	8.230.000	DAU		12 bulan 5 unit	41.500.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP Kota Pekalongan	100 persen	456.883.000	DAU		100 persen	546.494.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	DKP Kota Pekalongan	25 unit	112.595.000	DAU		25 unit	110.000.000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	- jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala	DKP Kota Pekalongan	1 unit	17.400.000	DAU		1 unit	16.000.000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	DKP Kota Pekalongan	1 unit	296.700.000	DAU		1 unit	397.994.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bulan terpeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	DKP Kota Pekalongan	12 bulan	30.188.000	DAU		12 bulan	22.500.000
VII	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DKP Kota Pekalongan	5 persen	298.048.000	DAU		5 persen	242.115.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang disusun	DKP Kota Pekalongan	1 dokumen	76.334.000	DAU		1 dokumen	100.000.000
23	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan yang diadakan	DKP Kota Pekalongan	1 unit	107.428.000	DAU		1 unit	92.115.000
24	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	- Jumlah penjaminan sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia - Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia	DKP Kota Pekalongan	1 unit	114.286.000	DAU		1 unit	50.000.000
VIII	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan kecil yang dibina	DKP Kota Pekalongan	10 persen	115.385.000	DAU		10 persen	92.350.000
25	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	- jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitas - Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan yang dibina	DKP Kota Pekalongan	33 KUB	71.418.000	DAU		33 KUB	34.350.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	- Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya - Jumlah kelompok nelayan yang dibina	DKP Kota Pekalongan	4 kelompok	-	DAU		4 kelompok	45.000.000
27	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	- Jumlah pendampingan nelayan yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha yang dilaksanakan - Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	DKP Kota Pekalongan	5 Nelayan	43.967.000	DAU		5 Nelayan	13.000.000
IX	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	DKP Kota Pekalongan	1 persen	2.552.187.000	DAU		1 persen	
28	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- jumlah bulan sewa gedung dan peralatan TPI - Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	DKP Kota Pekalongan	12 bulan	2.552.187.000	DAU		12 bulan	2.308.268.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah permohonan kapal yang didaftarkan	DKP Kota Pekalongan	43.33 persen	73.151.000	DAU		43.33 persen	42.247.000
29	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	- Jumlah dokumen pencatatan kapal - Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	DKP Kota Pekalongan	20 dokumen	40.904.000	DAU		20 dokumen	10.000.000
30	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	- Jumlah pendataan kapal - Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	DKP Kota Pekalongan	10 kapal	11.000.000	DAU		10 kapal	11.000.000
31	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	- Jumlah Pelayanan Pendaftaran yang dilayani - Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	DKP Kota Pekalongan	70 kapal 1 persen	21.247.000	DAU		70 kapal 1 persen	21.247.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
XI	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	persentase Pembudidaya yang dibina	DKP Kota Pekalongan	10 persen	63.600.000	DAU		10 persen	67.000.000
32	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklhasar yang dilaksanakan	DKP Kota Pekalongan	4 kategori	43.000.000	DAU		4 kategori	47.000.000
33	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pelatihan kolam bundar yang diadakan	DKP Kota Pekalongan	1 kali	20.600.000	DAU		1 kali	20.000.000
XII	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	DKP Kota Pekalongan	100 persen	351.000.000	DAU		100 persen	271.502.000
34	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data bidang budidaya yang disusun	DKP Kota Pekalongan	1 dokumen	12.000.000	DAU		1 dokumen	15.000.000
35	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	- Jumlah Prasarana Tambak Dinas/BBI yang dibangun - Jumlah UPI yang direhab	DKP Kota Pekalongan	1 unit 1 unit	180.000.000	DAU		1 unit 1 unit	80.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
36	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	- Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota - Jumlah Sarana Usaha Pembudidayaan yang diadakan Terkelolanya Balai Benih Ikan (BBI)	DKP Kota Pekalongan	1 unit 1 BBI	124.000.000	DAU		1 unit 1 BBI	50.000.000
37	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	- jumlah benih ikan yang diadakan - jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di darat	DKP Kota Pekalongan	750 ekor	35.000.000	DAU		750 ekor	126.502.000
XIII	penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DKP Kota Pekalongan	70 persen	935.990.000	DAU		70 persen	1.004.357.000
38	Pemberian Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	- jumlah gedung technopark yang terpelihara secara rutin - jumlah pelaksanaan gemar makan ikan - jumlah rehab gedung dikawasan technopark	DKP Kota Pekalongan	1 Kawasan 1 kali 0 Pelaku Usaha 2 unit	935.990.000	DAU		1 Kawasan 1 kali 0 Pelaku Usaha 2 unit	1.004.357.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

DKP Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023. Rancangan akhir rencana kerja DKP Tahun 2023 mengacu kepada RKPD Tahun 2023, mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan sub kegiatan DKP Tahun 2023 mengacu pada permendagri 90 tahun 2019 yang sudah ada dalam SIPD, sehingga ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana kerja dan pendanaan DKP Kota Pekalongan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DKP Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

No	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DKP Kota Pekalongan	jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	- jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah - jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun - jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) - jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	- 12 bulan - 4 dokumen - 2 dokumen - 5 dokumen	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP Kota Pekalongan	- jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DKP Kota Pekalongan	jumlah keikutsertaan dalam Karnaval Batik dan hari jadi	2 kali	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.	12 bulan 5 unit	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKP Kota Pekalongan	jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	100 orang/kali	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP Kota Pekalongan	ersentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan / bahan kebersihan kantor	12 bulan	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP Kota Pekalongan	persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKP Kota Pekalongan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	25 unit	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKP Kota Pekalongan	- jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKP Kota Pekalongan	jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	1 unit	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKP Kota Pekalongan	jumlah bulan terpeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	
VII	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DKP Kota Pekalongan	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 persen	
22	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	DKP Kota Pekalongan	umlah dokumen statistik perikanan tangkap yang disusun	1 dokumen	
23	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	DKP Kota Pekalongan	Jumlah prasarana usaha perikanan yang diadakan	1 unit	
24	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah penjaminan sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia - Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia	1 unit	
VIII	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	DKP Kota Pekalongan	Persentase Nelayan kecil yang dibina	10 persen	
25	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DKP Kota Pekalongan	- jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitas - Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan yang dibina	33 KUB	
26	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya - Jumlah kelompok nelayan yang dibina	4 kelompok	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah pendampingan nelayan yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha yang dilaksanakan - Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Nelayan	
IX	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	DKP Kota Pekalongan	peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	1 persen	
28	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	DKP Kota Pekalongan	- jumlah bulan sewa gedung dan peralatan TPI - Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 bulan	
X	penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP Kota Pekalongan	Persentase jumlah permohonan kapal yang didaftarkan	43.33 persen	
29	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah dokumen pencatatan kapal - Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 dokumen	
30	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah pendataan kapal - Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	10 kapal	
31	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah Pelayanan Pendaftaran yang dilayani - Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan	70 kapal 1 persen	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XI	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	DKP Kota Pekalongan	persentase Pembudidaya yang dibina	10 persen	
32	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	DKP Kota Pekalongan	Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklahsar yang dilaksanakan	4 kategori	
33	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	DKP Kota Pekalongan	Jumlah pelatihan kolam bundar yang diadakan	1 kali	
XII	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	DKP Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100 persen	
34	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen data bidang budidaya yang disusun	1 dokumen	
35	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah Prasarana Tambak Dinas/BBI yang dibangun - Jumlah UPI yang direhab	1 unit 1 unit	
36	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	DKP Kota Pekalongan	- Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota - Jumlah Sarana Usaha Pembudidayaan yang diadakan Terkelolanya Balai Benih Ikan (BBI)	1 unit 1 BBI	
37	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	DKP Kota Pekalongan	- jumlah benih ikan yang diadakan - jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di darat	750 ekor	
XIII	penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DKP Kota Pekalongan	persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70 persen	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	DKP Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah gedung technopark yang terpelihara secara rutin - jumlah pelaksanaan gemar makan ikan - jumlah rehab gedung dikawasan technopark 	1 Kawasan 1 kali 0 Pelaku Usaha 2 unit	

Dari tabel 4.1 tersebut diatas dapat dilihat bahwa rencana kerja pada tahun 2023 DKP Kota Pekalongan melaksanakan 1 (satu) Urusan Pilihan Penunjang yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan ke dalam 4 (empat) Program, 14 (lima belas) kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) sub kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2022, sangat tergantung kepada kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik, serta ditunjang oleh partisipasi berbagai komponen masyarakat dan sikap mental penyelenggara di daerah, khususnya jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

Renja merupakan penjabaran dari RPJMD, RENSTRA, kondisi lingkungan hidup, pengalaman empirik, dan dilandasi oleh landasan hukum yang jelas, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua *stakeholder*. Renstra diharapkan menjadi dokumen perencanaan taktis-strategis yang dijadikan dasar perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan tahunan dan penyusunan APBD di bidang kelautan dan perikanan.

Monitoring dan evaluasi kinerja yang hasilnya menjadi bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja perlu dilakukan secara lebih cermat dan akurat. Dari hasil evaluasi tersebut akan dapat direncanakan langkah-langkah yang tepat, untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan yang sudah dapat di implementasikan secara berkesinambungan.

Semoga RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja DKP telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang dan forum perangkat daerah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku yang berkepentingan dalam pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang tetap harus dikedepankan.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja DKP Kota Pekalongan Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja DKP disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran DKP Kota Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja DKP, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.

3. Bidang-bidang pada DKP, agar segera menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan oleh masing-masing bidang atau bagian. Dengan demikian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Kami berharap, bahwa Renja DKP ini dapat mengakomodir seluruh target indikator kinerja untuk urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Pekalongan, 3 Agustus 2022

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN**



Drs. SUGIYO

Pembina Tk. I

NIP. 196805091995121002